



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 193/PMK.07/2022
TENTANG
PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH.



Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu.
2. Peta Kapasitas Fiskal Daerah adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan rasio Kapasitas Fiskal Daerah.

Pasal 2

- (1) Peta Kapasitas Fiskal Daerah dapat digunakan untuk:
 - a. pertimbangan dalam penetapan daerah penerima hibah;
 - b. penentuan besaran dana pendamping oleh pemerintah daerah, jika dipersyaratkan;
 - c. pertimbangan dalam pembentukan dana abadi daerah;
 - d. pertimbangan dalam pemberian pembiayaan utang daerah; dan/atau
 - e. penggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peta Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Peta Kapasitas Fiskal Daerah provinsi; dan
 - b. Peta Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota.
- (3) Peta Kapasitas Fiskal Daerah provinsi dan Peta Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Peta Kapasitas Fiskal Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a disusun melalui 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. tahap I, penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah provinsi; dan
 - b. tahap II, penghitungan rasio Kapasitas Fiskal Daerah provinsi.
- (2) Peta Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b disusun melalui 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. tahap I, penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota; dan
 - b. tahap II, penghitungan rasio Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota.

Pasal 4

- (1) Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan formula sebagai berikut:
$$KFD_{provinsi-i} = [\text{pendapatan} + \text{penerimaan pembiayaan tertentu}] - [\text{pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan} + \text{belanja tertentu} + \text{pengeluaran pembiayaan tertentu}]$$

Keterangan:
 $KFD_{provinsi-i}$ = Kapasitas Fiskal Daerah suatu provinsi
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- pendapatan asli daerah;
 - pendapatan transfer; dan
 - lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- (3) Penerimaan pembiayaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
- (4) Pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- dana otonomi khusus; dan
 - dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (5) Belanja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- belanja pegawai;
 - belanja bunga; dan
 - belanja bagi hasil.
- (6) Pengeluaran pembiayaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembayaran cicilan pokok pinjaman daerah.

Pasal 5

- (1) Penghitungan rasio Kapasitas Fiskal Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan formula sebagai berikut:

$$RKFD_{provinsi-i} = \frac{KFD_{provinsi-i}}{\text{Belanja Pegawai}_{provinsi-i}}$$

Keterangan:

$RKFD_{provinsi-i}$ = Rasio Kapasitas Fiskal Daerah suatu provinsi

$KFD_{provinsi-i}$ = Kapasitas Fiskal Daerah suatu provinsi

$\text{Belanja Pegawai}_{provinsi-i}$ = Belanja Pegawai suatu provinsi

- (2) Berdasarkan hasil penghitungan rasio Kapasitas Fiskal Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daerah provinsi dikelompokkan dalam kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagai berikut:

Rentang RKFD	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
$RKFD < 1,442$	sangat rendah
$1,442 \leq RKFD < 1,756$	rendah
$1,756 \leq RKFD < 2,070$	sedang
$2,070 \leq RKFD < 2,384$	tinggi
$2,384 \leq RKFD$	sangat tinggi

Pasal 6

- (1) Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan formula sebagai berikut:
- $$KFD_{kabupaten/kota-i} = [\text{pendapatan} + \text{penerimaan pembiayaan tertentu}] - [\text{pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan} + \text{belanja tertentu} + \text{pengeluaran pembiayaan tertentu}]$$
- Keterangan:
- $$KFD_{kabupaten/kota-i} = \text{Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota}$$
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- pendapatan asli daerah;
 - pendapatan transfer; dan
 - lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- (3) Penerimaan pembiayaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
- (4) Pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dana otonomi khusus.
- (5) Belanja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- belanja pegawai;
 - belanja bunga;
 - belanja bagi hasil; dan
 - alokasi dana desa.
- (6) Pengeluaran pembiayaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembayaran cicilan pokok pinjaman daerah.

Pasal 7

- (1) Penghitungan rasio Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan formula sebagai berikut:

$$RKFD_{kabupaten/kota-i} = \frac{KFD_{kabupaten/kota-i}}{\text{Belanja Pegawai}_{kabupaten/kota-i}}$$

Keterangan:

$RKFD_{kabupaten/kota-i}$ = Rasio Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota

$KFD_{kabupaten/kota-i}$ = Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota

$\text{Belanja Pegawai}_{kabupaten/kota-i}$ = Belanja Pegawai suatu kabupaten/kota

- (2) Berdasarkan rasio Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daerah kabupaten/kota dikelompokkan dalam kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagai berikut:

Rentang RKFD	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
$RKFD < 1,171$	sangat rendah
$1,171 \leq RKFD < 1,504$	rendah
$1,504 \leq RKFD < 1,838$	sedang
$1,838 \leq RKFD < 2,171$	tinggi
$2,171 \leq RKFD$	sangat tinggi

Pasal 8

Penetapan kategori Kapasitas Fiskal bagi daerah otonom baru yang dibentuk pada tahun 2022 mengikuti kategori Kapasitas Fiskal Daerah bagi daerah otonom induk.

Pasal 9

Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menggunakan data anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 dan rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2021 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 991), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1277

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Administrasi Kementerian



MAS SOEHARTO
NIP 19690922 199001 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 193/PMK.07/2022
TENTANG
PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

A. PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH PROVINSI

No	Nama Daerah	Rasio KFD	Kategori KFD
1	Prov. Aceh	1,789	Sedang
2	Prov. Sumatera Utara	2,019	Sedang
3	Prov. Sumatera Barat	1,411	Sangat Rendah
4	Prov. Riau	2,215	Tinggi
5	Prov. Jambi	1,239	Sangat Rendah
6	Prov. Sumatera Selatan	1,890	Sedang
7	Prov. Bengkulu	1,019	Sangat Rendah
8	Prov. Lampung	1,580	Rendah
9	Prov. DKI Jakarta	3,007	Sangat Tinggi
10	Prov. Jawa Barat	2,546	Sangat Tinggi
11	Prov. Jawa Tengah	1,947	Sedang
12	Prov. DI Yogyakarta	1,230	Sangat Rendah
13	Prov. Jawa Timur	1,952	Sedang
14	Prov. Kalimantan Barat	1,873	Sedang
15	Prov. Kalimantan Tengah	2,314	Tinggi
16	Prov. Kalimantan Selatan	2,339	Tinggi
17	Prov. Kalimantan Timur	2,786	Sangat Tinggi
18	Prov. Sulawesi Utara	1,348	Sangat Rendah
19	Prov. Sulawesi Tengah	1,311	Sangat Rendah
20	Prov. Sulawesi Selatan	1,511	Rendah
21	Prov. Sulawesi Tenggara	1,284	Sangat Rendah
22	Prov. Bali	1,761	Sedang
23	Prov. Nusa Tenggara Barat	1,465	Rendah
24	Prov. Nusa Tenggara Timur	1,470	Rendah
25	Prov. Maluku	1,796	Sedang
26	Prov. Papua	2,543	Sangat Tinggi
27	Prov. Maluku Utara	2,633	Sangat Tinggi
28	Prov. Banten	2,934	Sangat Tinggi
29	Prov. Bangka Belitung	1,506	Rendah
30	Prov. Gorontalo	1,350	Sangat Rendah
31	Prov. Kepulauan Riau	1,621	Rendah
32	Prov. Papua Barat	3,952	Sangat Tinggi
33	Prov. Sulawesi Barat	1,548	Rendah
34	Prov. Kalimantan Utara	1,841	Sedang

B. PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH KABUPATEN/KOTA

No.	Nama Daerah	Rasio KFD	Kategori KFD
1	Kab. Aceh Barat	1,294	Rendah
2	Kab. Aceh Besar	2,096	Tinggi
3	Kab. Aceh Selatan	1,507	Sedang
4	Kab. Aceh Singkil	1,757	Sedang
5	Kab. Aceh Tengah	1,400	Rendah
6	Kab. Aceh Tenggara	2,168	Tinggi
7	Kab. Aceh Timur	1,396	Rendah
8	Kab. Aceh Utara	1,650	Sedang
9	Kab. Bireuen	1,410	Rendah
10	Kab. Pidie	1,530	Sedang
11	Kab. Simeulue	1,353	Rendah
12	Kota Banda Aceh	1,984	Tinggi
13	Kota Sabang	1,673	Sedang
14	Kota Langsa	1,456	Rendah
15	Kota Lhokseumawe	1,435	Rendah
16	Kab. Gayo Lues	1,886	Tinggi
17	Kab. Aceh Barat Daya	1,817	Sedang
18	Kab. Aceh Jaya	1,976	Tinggi
19	Kab. Nagan Raya	1,606	Sedang
20	Kab. Aceh Tamiang	1,635	Sedang
21	Kab. Bener Meriah	1,454	Rendah
22	Kab. Pidie Jaya	2,243	Sangat Tinggi
23	Kota Subulussalam	2,565	Sangat Tinggi
24	Kab. Asahan	1,263	Rendah
25	Kab. Dairi	1,304	Rendah
26	Kab. Deli Serdang	1,550	Sedang
27	Kab. Karo	1,258	Rendah
28	Kab. Labuhanbatu	1,221	Rendah
29	Kab. Langkat	0,872	Sangat Rendah
30	Kab. Mandailing Natal	1,046	Sangat Rendah
31	Kab. Nias	1,960	Tinggi
32	Kab. Simalungun	1,088	Sangat Rendah
33	Kab. Tapanuli Selatan	1,967	Tinggi
34	Kab. Tapanuli Tengah	1,282	Rendah
35	Kab. Tapanuli Utara	1,229	Rendah
36	Kab. Toba	1,354	Rendah
37	Kota Binjai	1,148	Sangat Rendah
38	Kota Medan	2,435	Sangat Tinggi
39	Kota Pematang Siantar	1,113	Sangat Rendah
40	Kota Sibolga	1,267	Rendah
41	Kota Tanjung Balai	1,005	Sangat Rendah
42	Kota Tebing Tinggi	1,270	Rendah
43	Kota Padang Sidempuan	1,160	Sangat Rendah
44	Kab. Pakpak Bharat	1,402	Rendah
45	Kab. Nias Selatan	2,328	Sangat Tinggi

No.	Nama Daerah	Rasio KFD	Kategori KFD
46	Kab. Humbang Hasundutan	1,470	Rendah
47	Kab. Serdang Bedagai	1,291	Rendah
48	Kab. Samosir	1,507	Sedang
49	Kab. Batu Bara	1,444	Rendah
50	Kab. Padang Lawas	1,673	Sedang
51	Kab. Padang Lawas Utara	1,696	Sedang
52	Kab. Labuhanbatu Selatan	1,606	Sedang
53	Kab. Labuhanbatu Utara	1,048	Sangat Rendah
54	Kab. Nias Utara	1,723	Sedang
55	Kab. Nias Barat	1,960	Tinggi
56	Kota Gunungsitoli	1,639	Sedang
57	Kab. Limapuluh Kota	0,881	Sangat Rendah
58	Kab. Agam	1,012	Sangat Rendah
59	Kab. Kepulauan Mentawai	1,552	Sedang
60	Kab. Padang Pariaman	0,797	Sangat Rendah
61	Kab. Pasaman	1,169	Sangat Rendah
62	Kab. Pesisir Selatan	1,055	Sangat Rendah
63	Kab. Sijunjung	1,218	Rendah
64	Kab. Solok	0,875	Sangat Rendah
65	Kab. Tanah Datar	0,885	Sangat Rendah
66	Kota Bukittinggi	1,691	Sedang
67	Kota Padang Panjang	1,140	Sangat Rendah
68	Kota Padang	1,194	Rendah
69	Kota Payakumbuh	1,199	Rendah
70	Kota Sawahlunto	1,370	Rendah
71	Kota Solok	1,215	Rendah
72	Kota Pariaman	1,108	Sangat Rendah
73	Kab. Pasaman Barat	1,075	Sangat Rendah
74	Kab. Dharmasraya	1,257	Rendah
75	Kab. Solok Selatan	1,336	Rendah
76	Kab. Bengkalis	2,422	Sangat Tinggi
77	Kab. Indragiri Hilir	1,322	Rendah
78	Kab. Indragiri Hulu	1,270	Rendah
79	Kab. Kampar	1,371	Rendah
80	Kab. Kuantan Singingi	1,226	Rendah
81	Kab. Pelalawan	2,267	Sangat Tinggi
82	Kab. Rokan Hilir	1,753	Sedang
83	Kab. Rokan Hulu	1,340	Rendah
84	Kab. Siak	1,376	Rendah
85	Kota Dumai	1,007	Sangat Rendah
86	Kota Pekanbaru	1,714	Sedang
87	Kab. Kepulauan Meranti	1,845	Tinggi
88	Kab. Batang Hari	1,691	Sedang
89	Kab. Bungo	1,497	Rendah
90	Kab. Kerinci	1,304	Rendah
91	Kab. Merangin	1,138	Sangat Rendah

No.	Nama Daerah	Rasio KFD	Kategori KFD
92	Kab. Muaro Jambi	1,170	Sangat Rendah
93	Kab. Sarolangun	1,449	Rendah
94	Kab. Tanjung Jabung Barat	1,604	Sedang
95	Kab. Tanjung Jabung Timur	1,549	Sedang
96	Kab. Tebo	1,671	Sedang
97	Kota Jambi	1,403	Rendah
98	Kota Sungai Penuh	1,212	Rendah
99	Kab. Lahat	1,971	Tinggi
100	Kab. Musi Banyuasin	1,809	Sedang
101	Kab. Musi Rawas	1,595	Sedang
102	Kab. Muara Enim	1,672	Sedang
103	Kab. Ogan Komering Ilir	1,535	Sedang
104	Kab. Ogan Komering Ulu	1,857	Tinggi
105	Kota Palembang	1,780	Sedang
106	Kota Prabumulih	1,292	Rendah
107	Kota Pagar Alam	1,452	Rendah
108	Kota Lubuk Linggau	0,743	Sangat Rendah
109	Kab. Banyuasin	1,873	Tinggi
110	Kab. Ogan Ilir	1,425	Rendah
111	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	1,286	Rendah
112	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	1,633	Sedang
113	Kab. Empat Lawang	2,303	Sangat Tinggi
114	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	2,507	Sangat Tinggi
115	Kab. Musi Rawas Utara	2,313	Sangat Tinggi
116	Kab. Bengkulu Selatan	1,065	Sangat Rendah
117	Kab. Bengkulu Utara	1,051	Sangat Rendah
118	Kab. Rejang Lebong	1,260	Rendah
119	Kota Bengkulu	0,921	Sangat Rendah
120	Kab. Kaur	1,649	Sedang
121	Kab. Seluma	1,231	Rendah
122	Kab. Mukomuko	1,327	Rendah
123	Kab. Lebong	1,467	Rendah
124	Kab. Kepahiang	1,223	Rendah
125	Kab. Bengkulu Tengah	1,445	Rendah
126	Kab. Lampung Barat	1,265	Rendah
127	Kab. Lampung Selatan	1,346	Rendah
128	Kab. Lampung Tengah	1,392	Rendah
129	Kab. Lampung Utara	0,877	Sangat Rendah
130	Kab. Lampung Timur	1,421	Rendah
131	Kab. Tanggamus	1,647	Sedang
132	Kab. Tulang Bawang	1,578	Sedang
133	Kab. Way Kanan	1,358	Rendah
134	Kota Bandar Lampung	1,346	Rendah
135	Kota Metro	1,124	Sangat Rendah
136	Kab. Pesawaran	1,505	Sedang
137	Kab. Pringsewu	1,170	Sangat Rendah

No.	Nama Daerah	Rasio KFD	Kategori KFD
138	Kab. Mesuji	2,055	Tinggi
139	Kab. Tulang Bawang Barat	1,355	Rendah
140	Kab. Pesisir Barat	2,158	Tinggi
141	Kab. Bandung	1,905	Tinggi
142	Kab. Bekasi	1,688	Sedang
143	Kab. Bogor	1,984	Tinggi
144	Kab. Ciamis	1,165	Sangat Rendah
145	Kab. Cianjur	1,804	Sedang
146	Kab. Cirebon	1,376	Rendah
147	Kab. Garut	1,270	Rendah
148	Kab. Indramayu	1,088	Sangat Rendah
149	Kab. Karawang	1,731	Sedang
150	Kab. Kuningan	1,329	Rendah
151	Kab. Majalengka	1,901	Tinggi
152	Kab. Purwakarta	1,371	Rendah
153	Kab. Subang	1,134	Sangat Rendah
154	Kab. Sukabumi	1,746	Sedang
155	Kab. Sumedang	1,045	Sangat Rendah
156	Kab. Tasikmalaya	1,174	Rendah
157	Kota Bandung	1,301	Rendah
158	Kota Bekasi	1,505	Sedang
159	Kota Bogor	1,434	Rendah
160	Kota Cirebon	1,471	Rendah
161	Kota Depok	2,625	Sangat Tinggi
162	Kota Sukabumi	1,191	Rendah
163	Kota Tasikmalaya	1,162	Sangat Rendah
164	Kota Cimahi	1,059	Sangat Rendah
165	Kota Banjar	1,032	Sangat Rendah
166	Kab. Bandung Barat	1,432	Rendah
167	Kab. Pangandaran	2,186	Sangat Tinggi
168	Kab. Banjarnegara	1,402	Rendah
169	Kab. Banyumas	1,230	Rendah
170	Kab. Batang	1,383	Rendah
171	Kab. Blora	1,305	Rendah
172	Kab. Boyolali	1,329	Rendah
173	Kab. Brebes	1,674	Sedang
174	Kab. Cilacap	1,456	Rendah
175	Kab. Demak	1,473	Rendah
176	Kab. Grobogan	1,561	Sedang
177	Kab. Jepara	1,387	Rendah
178	Kab. Karanganyar	0,999	Sangat Rendah
179	Kab. Kebumen	1,276	Rendah
180	Kab. Kendal	1,157	Sangat Rendah
181	Kab. Klaten	1,081	Sangat Rendah
182	Kab. Kudus	1,265	Rendah
183	Kab. Magelang	1,443	Rendah

No.	Nama Daerah	Rasio KFD	Kategori KFD
184	Kab. Pati	1,390	Rendah
185	Kab. Pekalongan	1,199	Rendah
186	Kab. Pemalang	0,927	Sangat Rendah
187	Kab. Purbalingga	1,153	Sangat Rendah
188	Kab. Purworejo	1,587	Sedang
189	Kab. Rembang	1,502	Rendah
190	Kab. Semarang	1,440	Rendah
191	Kab. Sragen	0,982	Sangat Rendah
192	Kab. Sukoharjo	1,302	Rendah
193	Kab. Tegal	1,366	Rendah
194	Kab. Temanggung	1,597	Sedang
195	Kab. Wonogiri	0,665	Sangat Rendah
196	Kab. Wonosobo	1,336	Rendah
197	Kota Magelang	1,362	Rendah
198	Kota Pekalongan	1,457	Rendah
199	Kota Salatiga	1,415	Rendah
200	Kota Semarang	1,916	Tinggi
201	Kota Surakarta	1,803	Sedang
202	Kota Tegal	1,445	Rendah
203	Kab. Bantul	1,444	Rendah
204	Kab. Gunung Kidul	1,276	Rendah
205	Kab. Kulon Progo	1,492	Rendah
206	Kab. Sleman	1,750	Sedang
207	Kota Yogyakarta	1,569	Sedang
208	Kab. Bangkalan	1,405	Rendah
209	Kab. Banyuwangi	2,136	Tinggi
210	Kab. Blitar	1,313	Rendah
211	Kab. Bojonegoro	3,986	Sangat Tinggi
212	Kab. Bondowoso	0,998	Sangat Rendah
213	Kab. Gresik	2,180	Sangat Tinggi
214	Kab. Jember	1,631	Sedang
215	Kab. Jombang	1,381	Rendah
216	Kab. Kediri	1,685	Sedang
217	Kab. Lamongan	1,915	Tinggi
218	Kab. Lumajang	1,587	Sedang
219	Kab. Madiun	1,523	Sedang
220	Kab. Magetan	1,073	Sangat Rendah
221	Kab. Malang	1,533	Sedang
222	Kab. Mojokerto	1,407	Rendah
223	Kab. Nganjuk	1,272	Rendah
224	Kab. Ngawi	1,185	Rendah
225	Kab. Pacitan	1,070	Sangat Rendah
226	Kab. Pamekasan	1,609	Sedang
227	Kab. Pasuruan	1,692	Sedang
228	Kab. Ponorogo	1,274	Rendah
229	Kab. Probolinggo	1,473	Rendah

No.	Nama Daerah	Rasio KFD	Kategori KFD
230	Kab. Sampang	1,333	Rendah
231	Kab. Sidoarjo	2,239	Sangat Tinggi
232	Kab. Situbondo	1,439	Rendah
233	Kab. Sumenep	1,297	Rendah
234	Kab. Trenggalek	1,049	Sangat Rendah
235	Kab. Tuban	1,354	Rendah
236	Kab. Tulungagung	1,085	Sangat Rendah
237	Kota Blitar	2,131	Tinggi
238	Kota Kediri	1,412	Rendah
239	Kota Madiun	1,361	Rendah
240	Kota Malang	1,716	Sedang
241	Kota Mojokerto	1,984	Tinggi
242	Kota Pasuruan	1,698	Sedang
243	Kota Probolinggo	1,588	Sedang
244	Kota Surabaya	2,751	Sangat Tinggi
245	Kota Batu	1,566	Sedang
246	Kab. Bengkayang	1,575	Sedang
247	Kab. Landak	1,663	Sedang
248	Kab. Kapuas Hulu	2,057	Tinggi
249	Kab. Ketapang	1,617	Sedang
250	Kab. Mempawah	1,215	Rendah
251	Kab. Sambas	1,896	Tinggi
252	Kab. Sanggau	1,435	Rendah
253	Kab. Sintang	1,470	Rendah
254	Kota Pontianak	1,725	Sedang
255	Kota Singkawang	0,982	Sangat Rendah
256	Kab. Sekadau	1,214	Rendah
257	Kab. Melawi	1,494	Rendah
258	Kab. Kayong Utara	1,798	Sedang
259	Kab. Kubu Raya	1,381	Rendah
260	Kab. Barito Selatan	1,377	Rendah
261	Kab. Barito Utara	1,921	Tinggi
262	Kab. Kapuas	1,851	Tinggi
263	Kab. Kotawaringin Barat	1,376	Rendah
264	Kab. Kotawaringin Timur	1,797	Sedang
265	Kota Palangka Raya	1,019	Sangat Rendah
266	Kab. Katingan	1,935	Tinggi
267	Kab. Seruyan	1,557	Sedang
268	Kab. Sukamara	1,811	Sedang
269	Kab. Lamandau	1,972	Tinggi
270	Kab. Gunung Mas	1,489	Rendah
271	Kab. Pulang Pisau	1,511	Sedang
272	Kab. Murung Raya	1,912	Tinggi
273	Kab. Barito Timur	1,595	Sedang
274	Kab. Banjar	1,780	Sedang
275	Kab. Barito Kuala	1,406	Rendah

No.	Nama Daerah	Rasio KFD	Kategori KFD
276	Kab. Hulu Sungai Selatan	1,798	Sedang
277	Kab. Hulu Sungai Tengah	1,541	Sedang
278	Kab. Hulu Sungai Utara	1,524	Sedang
279	Kab. Kotabaru	1,677	Sedang
280	Kab. Tabalong	1,796	Sedang
281	Kab. Tanah Laut	2,335	Sangat Tinggi
282	Kab. Tapin	2,768	Sangat Tinggi
283	Kota Banjarbaru	1,654	Sedang
284	Kota Banjarmasin	1,672	Sedang
285	Kab. Balangan	3,087	Sangat Tinggi
286	Kab. Tanah Bumbu	3,856	Sangat Tinggi
287	Kab. Berau	3,140	Sangat Tinggi
288	Kab. Kutai Kartanegara	1,832	Sedang
289	Kab. Kutai Barat	2,714	Sangat Tinggi
290	Kab. Kutai Timur	3,210	Sangat Tinggi
291	Kab. Paser	2,402	Sangat Tinggi
292	Kota Balikpapan	2,636	Sangat Tinggi
293	Kota Bontang	2,079	Tinggi
294	Kota Samarinda	2,124	Tinggi
295	Kab. Penajam Paser Utara	1,501	Rendah
296	Kab. Mahakam Ulu	4,661	Sangat Tinggi
297	Kab. Bolaang Mongondow	1,423	Rendah
298	Kab. Minahasa	1,124	Sangat Rendah
299	Kab. Kepulauan Sangihe	1,144	Sangat Rendah
300	Kota Bitung	1,481	Rendah
301	Kota Manado	1,592	Sedang
302	Kab. Kepulauan Talaud	1,544	Sedang
303	Kab. Minahasa Selatan	1,230	Rendah
304	Kota Tomohon	1,323	Rendah
305	Kab. Minahasa Utara	1,691	Sedang
306	Kota Kotamobagu	1,557	Sedang
307	Kab. Minahasa Tenggara	1,507	Sedang
308	Kab. Bolaang Mongondow Utara	1,939	Tinggi
309	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	1,376	Rendah
310	Kab. Bolaang Mongondow Timur	1,717	Sedang
311	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1,564	Sedang
312	Kab. Banggai	1,333	Rendah
313	Kab. Banggai Kepulauan	1,444	Rendah
314	Kab. Buol	0,964	Sangat Rendah
315	Kab. Toli-Toli	1,272	Rendah
316	Kab. Donggala	1,463	Rendah
317	Kab. Morowali	2,269	Sangat Tinggi
318	Kab. Poso	0,983	Sangat Rendah
319	Kota Palu	1,667	Sedang
320	Kab. Parigi Moutong	1,328	Rendah

No.	Nama Daerah	Rasio KFD	Kategori KFD
321	Kab. Tojo Una-Una	1,635	Sedang
322	Kab. Sigi	1,287	Rendah
323	Kab. Banggai Laut	1,583	Sedang
324	Kab. Morowali Utara	1,573	Sedang
325	Kab. Bantaeng	1,389	Rendah
326	Kab. Barru	1,036	Sangat Rendah
327	Kab. Bone	1,335	Rendah
328	Kab. Bulukumba	1,160	Sangat Rendah
329	Kab. Enrekang	1,002	Sangat Rendah
330	Kab. Gowa	1,249	Rendah
331	Kab. Jeneponto	1,283	Rendah
332	Kab. Luwu	1,287	Rendah
333	Kab. Luwu Utara	1,486	Rendah
334	Kab. Maros	1,353	Rendah
335	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	1,231	Rendah
336	Kab. Pinrang	1,250	Rendah
337	Kab. Kepulauan Selayar	1,939	Tinggi
338	Kab. Sidenreng Rappang	1,237	Rendah
339	Kab. Sinjai	1,147	Sangat Rendah
340	Kab. Soppeng	1,124	Sangat Rendah
341	Kab. Takalar	1,168	Sangat Rendah
342	Kab. Tana Toraja	1,249	Rendah
343	Kab. Wajo	1,123	Sangat Rendah
344	Kota Parepare	1,587	Sedang
345	Kota Makassar	2,648	Sangat Tinggi
346	Kota Palopo	1,164	Sangat Rendah
347	Kab. Luwu Timur	2,277	Sangat Tinggi
348	Kab. Toraja Utara	1,590	Sedang
349	Kab. Buton	1,351	Rendah
350	Kab. Konawe	1,444	Rendah
351	Kab. Kolaka	1,699	Sedang
352	Kab. Muna	1,040	Sangat Rendah
353	Kota Kendari	1,750	Sedang
354	Kota Bau-Bau	0,775	Sangat Rendah
355	Kab. Konawe Selatan	1,173	Rendah
356	Kab. Bombana	1,898	Tinggi
357	Kab. Wakatobi	1,687	Sedang
358	Kab. Kolaka Utara	1,498	Rendah
359	Kab. Konawe Utara	2,189	Sangat Tinggi
360	Kab. Buton Utara	1,959	Tinggi
361	Kab. Kolaka Timur	2,236	Sangat Tinggi
362	Kab. Konawe Kepulauan	3,387	Sangat Tinggi
363	Kab. Muna Barat	2,124	Tinggi
364	Kab. Buton Tengah	1,876	Tinggi
365	Kab. Buton Selatan	1,719	Sedang
366	Kab. Badung	1,356	Rendah

No.	Nama Daerah	Rasio KFD	Kategori KFD
367	Kab. Bangli	1,092	Sangat Rendah
368	Kab. Buleleng	1,224	Rendah
369	Kab. Gianyar	1,789	Sedang
370	Kab. Jembrana	1,365	Rendah
371	Kab. Karangasem	0,956	Sangat Rendah
372	Kab. Klungkung	1,092	Sangat Rendah
373	Kab. Tabanan	0,936	Sangat Rendah
374	Kota Denpasar	1,159	Sangat Rendah
375	Kab. Bima	1,287	Rendah
376	Kab. Dompu	1,407	Rendah
377	Kab. Lombok Barat	1,379	Rendah
378	Kab. Lombok Tengah	1,065	Sangat Rendah
379	Kab. Lombok Timur	1,539	Sedang
380	Kab. Sumbawa	1,339	Rendah
381	Kota Mataram	1,599	Sedang
382	Kota Bima	1,200	Rendah
383	Kab. Sumbawa Barat	1,951	Tinggi
384	Kab. Lombok Utara	1,579	Sedang
385	Kab. Alor	1,900	Tinggi
386	Kab. Belu	1,559	Sedang
387	Kab. Ende	1,486	Rendah
388	Kab. Flores Timur	1,396	Rendah
389	Kab. Kupang	1,537	Sedang
390	Kab. Lembata	1,449	Rendah
391	Kab. Manggarai	1,678	Sedang
392	Kab. Ngada	1,310	Rendah
393	Kab. Sikka	1,262	Rendah
394	Kab. Sumba Barat	2,682	Sangat Tinggi
395	Kab. Sumba Timur	2,122	Tinggi
396	Kab. Timor Tengah Selatan	1,915	Tinggi
397	Kab. Timor Tengah Utara	2,055	Tinggi
398	Kota Kupang	1,243	Rendah
399	Kab. Rote Ndao	1,645	Sedang
400	Kab. Manggarai Barat	2,378	Sangat Tinggi
401	Kab. Nagekeo	1,373	Rendah
402	Kab. Sumba Tengah	2,304	Sangat Tinggi
403	Kab. Sumba Barat Daya	2,336	Sangat Tinggi
404	Kab. Manggarai Timur	1,780	Sedang
405	Kab. Sabu Raijua	2,015	Tinggi
406	Kab. Malaka	1,368	Rendah
407	Kab. Kepulauan Tanimbar	1,609	Sedang
408	Kab. Maluku Tengah	1,167	Sangat Rendah
409	Kab. Maluku Tenggara	2,145	Tinggi
410	Kab. Buru	1,475	Rendah
411	Kota Ambon	1,241	Rendah
412	Kab. Seram Bagian Barat	1,415	Rendah

No.	Nama Daerah	Rasio KFD	Kategori KFD
413	Kab. Seram Bagian Timur	1,873	Tinggi
414	Kab. Kepulauan Aru	2,703	Sangat Tinggi
415	Kota Tual	2,578	Sangat Tinggi
416	Kab. Maluku Barat Daya	2,492	Sangat Tinggi
417	Kab. Buru Selatan	2,387	Sangat Tinggi
418	Kab. Biak Numfor	2,337	Sangat Tinggi
419	Kab. Jayapura	2,225	Sangat Tinggi
420	Kab. Jayawijaya	2,701	Sangat Tinggi
421	Kab. Merauke	2,116	Tinggi
422	Kab. Mimika	4,781	Sangat Tinggi
423	Kab. Nabire	1,544	Sedang
424	Kab. Paniai	2,815	Sangat Tinggi
425	Kab. Puncak Jaya	3,006	Sangat Tinggi
426	Kab. Kepulauan Yapen	1,886	Tinggi
427	Kota Jayapura	1,336	Rendah
428	Kab. Sarmi	3,084	Sangat Tinggi
429	Kab. Keerom	1,807	Sedang
430	Kab. Yahukimo	3,058	Sangat Tinggi
431	Kab. Pegunungan Bintang	2,974	Sangat Tinggi
432	Kab. Tolikara	4,646	Sangat Tinggi
433	Kab. Boven Digoel	2,751	Sangat Tinggi
434	Kab. Mappi	2,618	Sangat Tinggi
435	Kab. Asmat	2,586	Sangat Tinggi
436	Kab. Waropen	2,029	Tinggi
437	Kab. Supiori	1,641	Sedang
438	Kab. Mamberamo Raya	2,974	Sangat Tinggi
439	Kab. Mamberamo Tengah	2,647	Sangat Tinggi
440	Kab. Yalimo	2,721	Sangat Tinggi
441	Kab. Lanny Jaya	3,661	Sangat Tinggi
442	Kab. Nduga	6,708	Sangat Tinggi
443	Kab. Puncak	2,453	Sangat Tinggi
444	Kab. Dogiyai	3,356	Sangat Tinggi
445	Kab. Intan Jaya	2,711	Sangat Tinggi
446	Kab. Deiyai	2,573	Sangat Tinggi
447	Kab. Halmahera Tengah	4,716	Sangat Tinggi
448	Kota Ternate	1,042	Sangat Rendah
449	Kab. Halmahera Barat	1,590	Sedang
450	Kab. Halmahera Timur	2,311	Sangat Tinggi
451	Kab. Halmahera Selatan	2,538	Sangat Tinggi
452	Kab. Halmahera Utara	2,944	Sangat Tinggi
453	Kab. Kepulauan Sula	1,970	Tinggi
454	Kota Tidore Kepulauan	1,516	Sedang
455	Kab. Pulau Morotai	3,136	Sangat Tinggi
456	Kab. Pulau Taliabu	3,669	Sangat Tinggi
457	Kab. Lebak	1,340	Rendah
458	Kab. Pandeglang	0,948	Sangat Rendah

No.	Nama Daerah	Rasio KFD	Kategori KFD
459	Kab. Serang	1,364	Rendah
460	Kab. Tangerang	1,648	Sedang
461	Kota Cilegon	1,493	Rendah
462	Kota Tangerang	2,003	Tinggi
463	Kota Serang	1,245	Rendah
464	Kota Tangerang Selatan	2,625	Sangat Tinggi
465	Kab. Bangka	1,551	Sedang
466	Kab. Belitung	1,200	Rendah
467	Kota Pangkal Pinang	1,420	Rendah
468	Kab. Bangka Selatan	1,735	Sedang
469	Kab. Bangka Tengah	1,284	Rendah
470	Kab. Bangka Barat	1,733	Sedang
471	Kab. Belitung Timur	1,289	Rendah
472	Kab. Boalemo	1,288	Rendah
473	Kab. Gorontalo	1,117	Sangat Rendah
474	Kota Gorontalo	1,242	Rendah
475	Kab. Pohuwato	1,578	Sedang
476	Kab. Bone Bolango	1,198	Rendah
477	Kab. Gorontalo Utara	1,749	Sedang
478	Kab. Karimun	1,930	Tinggi
479	Kab. Bintan	1,283	Rendah
480	Kab. Natuna	1,261	Rendah
481	Kota Batam	1,758	Sedang
482	Kota Tanjung Pinang	1,152	Sangat Rendah
483	Kab. Lingga	1,468	Rendah
484	Kab. Kepulauan Anambas	1,029	Sangat Rendah
485	Kab. Fakfak	1,568	Sedang
486	Kab. Manokwari	1,200	Rendah
487	Kab. Sorong	1,958	Tinggi
488	Kota Sorong	1,307	Rendah
489	Kab. Raja Ampat	2,367	Sangat Tinggi
490	Kab. Sorong Selatan	1,399	Rendah
491	Kab. Teluk Bintuni	3,314	Sangat Tinggi
492	Kab. Teluk Wondama	2,805	Sangat Tinggi
493	Kab. Kaimana	2,500	Sangat Tinggi
494	Kab. Tambrauw	5,611	Sangat Tinggi
495	Kab. Maybrat	3,490	Sangat Tinggi
496	Kab. Manokwari Selatan	2,210	Sangat Tinggi
497	Kab. Pegunungan Arfak	3,864	Sangat Tinggi
498	Kab. Majene	1,099	Sangat Rendah
499	Kab. Mamuju	1,402	Rendah
500	Kab. Polewali Mandar	1,155	Sangat Rendah
501	Kab. Mamasa	0,858	Sangat Rendah
502	Kab. Pasangkayu	1,747	Sedang
503	Kab. Mamuju Tengah	2,603	Sangat Tinggi
504	Kab. Bulungan	1,818	Sedang

No.	Nama Daerah	Rasio KFD	Kategori KFD
505	Kab. Malinau	1,768	Sedang
506	Kab. Nunukan	1,647	Sedang
507	Kota Tarakan	1,563	Sedang
508	Kab. Tana Tidung	1,490	Rendah

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Administrasi Kementerian



MAS SOEHARTO
NIP 19690922 199001 1 001